

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Kecamatan Kelumpang Barat

Kecamatan Kelumpang Barat adalah salah satu wilayah dari Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis kecamatan kelumpang barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Sampanahan pada bagian utara, Kecamatan Kelumpang Selatan pada bagian Selatan, Kecamatan Kelumpang Hulu pada bagian Timur, dan pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu.

Gambar 4 1: Peta Kec. Kelumpang Barat



Sumber: BPS Kabupaten Kotabaru, 2013

Secara astronomis Kecamatan Kelumpang Barat berada pada letak 002042'08" – 003006'08" Lintang Selatan dan 115050'11" – 116006'57" Bujur Timur. Luas wilayahnya mencapai 485,46 km², yang mencakup

perkebunan, daratan, dan permukiman masyarakat, yang didominasi dataran rendah dan perbukitan. Wilayah administratif Kecamatan Kelumpang Barat terdiri dari 6 (enam) desa yaitu Batang Kulur, Bungkukan, Siayuh, Tanjung sari, Magalau Hulu, dan Magalau Hilir, dengan total jumlah penduduk sebanyak 8.035 jiwa (BPS Kotabaru, 2025).

Kecamatan ini merupakan kawasan yang kaya dalam sumber daya alam (SDA), terutama di sektor perkebunan, pertanian, dan hasil bumi lainnya. Komoditas yang menggerakkan roda ekonomi di Kecamatan Kelumpang Barat diantaranya seperti kelapa sawit dan karet yang menjadi komoditas utama; pertanian yang terdiri padi, jagung, dan hortikultura; UMKM dan hasil olahan seperti produk pertanian; dan energi pertambangan karena terdapat beberapa desa yang memiliki potensi sumber daya mineral.

Secara umum, kondisi pelayanan publik dan infrastruktur di wilayah Kecamatan Kelumpang Barat sudah tergolong memadai. Hal ini didukung oleh aksesibilitas transportasi darat yang dapat dijangkau, baik melalui jalan kabupaten maupun jalan desa. Selain aspek fisik tersebut, fasilitas pendidikan juga tersedia cukup lengkap, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Demikian pula dalam pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, kecamatan ini telah tersedia 2 layanan yaitu puskesmas dan poliklinik. Meskipun demikian, dari sisi komunikasi dan teknologi, jaringan telekomunikasi memang sudah menjangkau wilayah

ini, namun sebarannya masih belum merata ke seluruh pelosok desa (Kecamatan Kelumpang Barat, 2025).

2. Karakteristik Informan

Penelitian ini melibatkan sebanyak lima informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria telah terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit minimal selama tiga tahun. Pemilihan informan dilakukan agar dapat merepresentasikan bentuk keterlibatan utama dalam sektor perkebunan kelapa sawit, yaitu petani swadaya, petani plasma, buruh panen, dan pengepul atau tengkulak.

Tabel 4 1: Karakteristik Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Peran	Tahun Mulai Terlibat
1	Rahmat Prataja (Amat)	39	Petani Swadaya, Pengepul, Petani Plasma	2016
2	Trisno Widodo (Tris)	57	Petani Swadaya	2005
3	Sutopo	45	Petani Swadaya, Petani Plasma	2017
4	Mardan	36	Buruh Panen, Petani Swadaya	2012
5	Ahmad Jaelani (Lani)	26	Buruh Panen	2017

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 bahwa informan dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang beragam mulai dari segi usia, lama keterlibatan, dan bentuk keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini melibatkan 3 informan yang berperan sebagai petani swadaya, yaitu Amat, Tris, dan Sutopo. Ketiga informan ini mengelola perkebunan kelapa sawit secara mandiri tanpa keterikatan langsung dengan perusahaan dalam hal pengelolaan kebun. Lama keterlibatan mereka dalam sektor sawit bervariasi, informan Tris telah terlibat sejak tahun 2005, informan Amat terlibat sejak tahun 2016, dan informan Sutopo terlibat sejak tahun 2017.

Informan yang terlibat dalam peran petani plasma, yaitu informan Amat yang juga berperan sebagai petani swadaya dan pengepul. Sistem plasma yang berlaku di Kecamatan Kelumpang Barat adalah kemitraan dengan PT Palma Plantation, yaitu petani plasma menerima pendapatan bersih berkisar antara Rp400.000 hingga Rp2.900.000 per bulan setelah dipotong angsuran kredit kebun, pola yang digunakan adalah perusahaan mengelola seluruh aspek produksi dan petani plasma hanya menerima hasil bersih setiap bulannya.

Informan buruh panen dalam penelitian ini, yaitu Mardan dan Lani. Keduanya bekerja dengan sistem upah borongan sebesar Rp300.000 per ton hasil panen kelapa sawit. Informan Mardan memiliki pengalaman buruh panen sejak tahun 2012. Sebelumnya, Mardan bekerja sebagai

tukang bangunan serabutan. Profil informan Mardan terjadi transisi dari buruh panen menuju petani swadaya pada tahun 2020 dan menghasilkan TBS pada tahun 2023. Sementara itu, informan Lani sepenuhnya menggantungkan pendapatan dari upah sebagai buruh panen. Akumulasi pendapatan dalam sebulan mencapai sekitar Rp5.000.000.

Secara keseluruhan, karakteristik informan dalam penelitian ini menunjukkan keberagaman mulai dari latar belakang, lama keterlibatan, kepemilikan aset, dan bentuk keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Keberagaman ini membantu peneliti untuk memperoleh data yang kaya tentang dinamika kesejahteraan ekonomi dari berbagai perspektif dan posisi dalam struktur ekonomi perkebunan kelapa sawit masyarakat lokal.

3. Hasil Wawancara dan Observasi

Bagian ini menyajikan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap 5 informan yang terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kelumpang Barat. Data ini disajikan berdasarkan 2 fokus utama penelitian yaitu bentuk keterlibatan masyarakat dalam sektor perkebunan kelapa sawit dan dinamika kesejahteraan ekonomi yang dialami sebagai akibat dari keterlibatan tersebut.

a. Bentuk keterlibatan masyarakat

1) Petani Swadaya

Informan Amat memulai keterlibatannya dalam sektor perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016. Sebelum terjun dalam sektor ini informan membuka usaha isi ulang air minum saja.

“Awal-awal merintis saya memiliki luas 3 hektar dan setiap tahunnya selalu ditambah dari hasil sawit (berputar) dan pernah pinjam (uang) di Bank untuk memperluas lahan.” (Amat, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Tris memulai keterlibatannya dalam sektor perkebunan kelapa sawit ini pada tahun 2005. Beliau menjelaskan:

“Terjun di sektor perkebunan kelapa sawit pada tahun 2005 itu seluas 1 hektar sebagai tambahan pemasukan (*income*) dari pekerjaan utama menjadi security di Sinarmas” (Tris, wawancara pribadi, November 2025)

Dari pendapatan hasil panen digunakan lagi untuk mengembangkan luas lahan kebun. Informan Tris menjadikan perkebunan sawit yang dimiliki sebagai pemasukan tambahan hingga beliau pensiun yaitu pada tahun 2018, kemudian dimulai tahun 2018 hingga sekarang hasil panen menjadi pendapatan utama oleh informan Tris.

Pola kerja dalam sistem hasil panen dari perkebunan kelapa sawit, informan Sutopo menjelaskan bahwa pohon yang sudah menghasilkan TBS akan dipanen setiap 15 hari sekali atau 2 kali dalam sebulan. Apabila luas lahan 3 hektar maka akan menghasilkan rata-rata 2,8 ton TBS pada masa panen raya.

Sistem pemupukan yang umumnya digunakan oleh petani swadaya adalah menggunakan sistem hutang (kredit). Informan Sutopo dan Mardan menyatakan:

“Untuk pemupukan biasanya sistem hutang (kredit) kepada penjual pupuk yang sekaligus menjadi pengepul, sehingga pembayarannya dilakukan setiap masa panen (autodebet) di tempat pengepul tersebut”.

Sistem ini menunjukkan bahwa petani swadaya mengelola seluruh aspek produksi, termasuk dalam mengatur pembiayaan input produksi dan menanggung risiko secara mandiri.

2) Petani Plasma

Skema kemitraan (plasma) menjadi bentuk keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Informan Amat dan Sutopo menyebutkan bahwa selain usaha mandiri, ia juga menjadi petani plasma atau penerima plasma dari PT Palma Plantation sejak tahun 2022. Informan Sutopo menjelaskan:

“Skema ini, setiap kepala keluarga (KK) mendapatkan alokasi lahan perkebunan kelapa sawit seluas 0,8 hektar” (Sutopo, wawancara pribadi, November 2025)

Pengelolaan kebun sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan (*full management*), sehingga petani tidak terlibat dalam aktivitas operasional. Hasil panen yang dihasilkan dari perkebunan yang disebut sebagai pendapatan kotor dan akan mengalami pemotongan meliputi biaya koperasi, biaya operasional kebun, dan angsuran kredit bulanan lahan kebun. Pendapatan bersih yang diterima fluktuatif berkisar Rp400.000 – Rp2.900.000 atau rata-

rata pendapatan Rp1.650.000 per bulan. Pendapatan dari hasil plasma ini dijadikan sebagai pendapatan sampingan (*side income*), pendapatan utama tetap dilakukan melalui usaha lain secara mandiri atau pekerjaan lain.

3) Buruh Panen

Masyarakat yang memiliki keterbatasan modal, keterlibatannya dalam sektor perkebunan kelapa sawit sebagai buruh panen. Sistem pengupahan yang berlaku pada kebun swadaya menggunakan sistem borongan per ton. Informan Mardan menyatakan bahwa:

“Untuk upah borongan yang didapatkan dari buruh panen sebanyak Rp300.000 per ton” (Mardan, wawancara pribadi, November 2025)

Sistem kerja ini memiliki tantangan fisik dan alam. Informan Lani menjelaskan adanya “masa trek” (fase generatif/kembang jantan) yang umumnya terjadi 2 tahun sekali selama kurang lebih 6 bulan, akan menghasilkan pendapatan yang menurun karena buahnya sedikit.

4) Pengepul

Peran pengepul menjadi jembatan vital antara petani swadaya dan pabrik kelapa sawit (PKS). Informan Amat awalnya petani swadaya melakukan diversifikasi peran menjadi pengepul sejak 2018. Motivasi utamanya menjadi peran tersebut adalah meningkatkan pendapatan.

“Ingin mendapatkan tambahan agar saya bisa mengirim ke perusahaan dengan volume yang besar. Saya menjual ke pabrik yang menawarkan harga paling tinggi.” (Amat, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Amat menjual ke beberapa perusahaan sawit seperti Sinarmas, PT Bukit Kapur, dan PT Sapir Magalau. Menjadi pengepul memiliki risiko utamanya yaitu fluktuasi harga harian yang terjadi. Ia menjelaskan apabila buah yang dibeli dari petani lokal itu tidak dikirimkan (dijual) ke perusahaan sawit di hari yang sama maka akan memungkinkan terjadi perubahan harga TBS turun misalnya Rp30 atau Rp50 rupiah per kilogram.

b. Dinamika Kesejahteraan Ekonomi

Berikut paparan dari hasil wawancara dan observasi dari informan yang berkaitan dengan dinamika kesejahteraan ekonomi yang dialami masyarakat lokal akibat keterlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Dinamika kesejahteraan ekonomi dianalisis berdasarkan kacamata dua indikator, yaitu indikator kesejahteraan ekonomi adaptasi dari standar BPS dan indikator kesejahteraan perspektif ekonomi Islam dengan pendekatan Maqashid Syariah.

Dinamika kesejahteraan yang terjadi berdasarkan indikator dari standar BPS sebagai berikut:

1) Pendapatan Rumah Tangga

Sebagian besar informan mengalami peningkatan pendapatan setelah terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit, namun tingkat dan signifikansinya berbeda-beda antar

kelompok aktor. Pengepul, petani swadaya, dan buruh panen secara umum mengalami peningkatan pendapatan yang nyata. Sebaliknya, petani plasma memperoleh pendapatan yang sangat terbatas (rata-rata Rp1.650.000 per bulan) sehingga tidak memadai sebagai sumber penghasilan utama, melainkan hanya dijadikan sebagai pendapatan sampingan (*side income*). Variasi ini mencerminkan bahwa dinamika kesejahteraan ekonomi dalam sektor perkebunan kelapa sawit tidak bersifat seragam, melainkan sangat ditentukan oleh posisi dan peran masing-masing aktor dalam struktur produksi.

Informan Amat yang telah menjadi petani swadaya, petani plasma dan berkembang menjadi pengepul dan penjual pupuk menyatakan:

“Perubahan yang terjadi pemasukan menjadi bertambah sebanyak 50% dan hingga sekarang banyak memiliki tabungan dan aset.” (Amat, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Sutopo mengalami peningkatan pendapatan yang lebih tinggi. Ia menjelaskan bahwa:

“Terjadi perubahan pendapatan yaitu peningkatan sekitar 60-65% dibanding sebelum memiliki kebun sawit atau dibanding bekerja tukang atau serabutan lepas.” (Sutopo, wawancara pribadi, November 2025)

Hal serupa dirasakan oleh Informan Tris yang sebelumnya bekerja sebagai security di perusahaan perkebunan. Ia menjelaskan:

“Perubahan *income* sebelum dan sesudah ke sektor sawit menjadi bertambah, justru tambahan tersebut lebih banyak dari pada pekerjaan utama menjadi security.” (Tris, wawancara pribadi, November 2025)

Setelah pensiun pada tahun 2018, sektor sawit menjadi pemasukan atau pendapatan utama bagi informan Tris dan hingga sekarang ia *full time* untuk mengurus kebun sawit.

Sementara itu, informan Lani yang bekerja sebagai buruh panen menyatakan bahwa pendapatan dari sektor sawit ini lebih stabil dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya yang menjadi buruh tukang bangunan. Ia menyatakan bahwa:

“Perubahan yang terjadi dalam pendapatan menjadi lebih banyak, karena untuk menjadi buruh panen itu panggilannya lebih banyak dan selalu ada, jika dibandingkan menjadi tukang yang tidak menentu. Akumulasi menjadi buruh dalam sebulan sekitar Rp5.000.000.” (Lani, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Mardan yang menjadi buruh dan mulai bertransisi menjadi petani swadaya juga merasakan perubahan pola pendapatan. Sejak tahun 2023, pekerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit ini menjadi pekerjaan utama dan pekerjaan sebagai tukang bangunan menjadi pemasukan tambahan.

2) Pengeluaran Rumah Tangga

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam pola pengeluaran dan kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok antar kelompok aktor. Informan dari kelompok petani swadaya, pengepul, dan buruh panen menyatakan bahwa kebutuhan pokok

rumah tangga dapat terpenuhi dengan lebih baik setelah terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit, dan sebagian bahkan mampu menghasilkan surplus pendapatan untuk tabungan dan investasi produktif. Namun demikian, kondisi ini tidak berlaku bagi petani plasma. Inilah mengapa dalam praktiknya, seluruh informan yang menerima plasma menjadikan pendapatan tersebut hanya sebagai *side income*, sementara pendapatan utama tetap berasal dari sumber lain seperti usaha swadaya mandiri, pekerjaan formal, atau usaha informal lainnya.

Informan menjelaskan pola pengeluaran rumah tangganya:

“Hasil sawit itu modalnya untuk pupuk, perawatan, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari dan tabungan.” (Tris, wawancara pribadi, November 2025)

Pola pengeluaran ini menunjukkan adanya alokasi reinvestasi, konsumsi rumah tangga, dan *saving*. Namun, dalam pemupukan kebun sawit diperlukan strategi pengelolaan kas. Hal ini disebabkan harga pupuk yang cukup tinggi atau mahal. Masyarakat disana menggunakan pupuk non subsidi karena harga 1 karung pupuk dengan berat 50 kilogram mencapai Rp450.000. 1 karung pupuk ini dapat digunakan untuk 25 pohon sawit.

“Untuk pembelian atau pembayaran pupuk kepada pengepul yang sekaligus penjual pupuk, sehingga pembayaran dapat dilakukan setiap panen (kredit). Hasil panen yang dijual kepada pengepul langsung dipotong untuk pembayaran kredit pupuk sebesar Rp200.000 – Rp500.000 tergantung sedikit banyaknya hasil panen.” (Sutopo, wawancara pribadi, November 2025)

Meskipun biaya produksi cukup tinggi, semua informan menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh masih dapat menghasilkan surplus setelah dikurangi pengeluaran kebutuhan pokok dan biaya produksi. Surplus ini digunakan untuk menabung, investasi perluasan lahan, atau pembelian aset produktif lainnya.

3) Kondisi Tempat Tinggal

Semua informan memiliki kondisi tempat tinggal yang sangat layak untuk ditinggali. Informan mengalami perubahan dan perbaikan kondisi tempat tinggal setelah terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Informan menyebutkan bahwa:

“Terjadi perubahan dalam kondisi rumah (dapat merenovasi rumah).” (Sutopo, wawancara pribadi, November 2025)

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa rumah informan berbentuk permanen dengan struktur bangunan yang kokoh. Atap rumah menggunakan seng atau asbes, dinding rumah ada yang menggunakan bata, dan semi bata yang dikombinasikan dengan kalsiboard, serta lantai rumah dari keramik atau semen.

4) Fasilitas Tempat Tinggal

Akses terhadap fasilitas dasar seperti listrik, air bersih, dan sarana penunjang lainnya mengalami peningkatan yang konsisten di antara seluruh informan. Dari hasil observasi,

menunjukkan bahwa informan Amat mengalami peningkatan yang signifikan, begitu juga dengan informan lainnya yaitu:

“Alhamdulillah selama mengelola sawit, tidak pernah mengalami keberatan untuk masalah fasilitas itu, semua terpenuhi dari hasil sawit itu” (Tris, wawancara pribadi, November 2025)

“Fasilitas rumah berangsur – angsur menjadi lebih baik” (Mardan, wawancara pribadi, November 2025)

“Kalau soal fasilitas otomatis pasti ada perubahan. Perubahan itu kemungkinan kurang lebih 80% menjadi lebih nyaman semenjak terjun di sektor kelapa sawit” (Sutopo, wawancara pribadi, November 2025)

“Ada perubahan, karena sejak terlibat di sektor perkebunan kelapa sawit saya bisa membangun rumah sendiri dengan fasilitas yang memadai” (Lani, wawancara pribadi, November 2025)

Secara keseluruhan, pengakuan para informan di atas menggambarkan bahwa pemenuhan fasilitas tempat tinggal yang layak bukan lagi menjadi kendala utama. Hasil dari perkebunan sawit telah berhasil mentransformasi kondisi hunian mereka menjadi jauh lebih memadai dan nyaman dibandingkan sebelumnya.

5) Kesehatan Anggota Keluarga

Kondisi kesehatan anggota keluarga merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menggali perubahan kondisi kesehatan keluarga informan setelah terlibat dalam sektor kelapa sawit, termasuk kemudahan berobat serta kepemilikan asuransi kesehatan.

“Alhamdulillah semuanya (keluarga) sehat dan punya asuransi BPJS mandiri yang bukan bantuan pemerintah, dalam pembayaran atau iuran perbulan juga masih mudah untuk membayarnya” (Sutopo, wawancara pribadi, November 2025).

“Alhamdulillah semua sehat dan untuk BPJS ada. Belum pernah berobat dengan BPJS dan berobat dengan biaya mandiri” (Tris, wawancara pribadi, November 2025)

Semua informan menyatakan bahwa kondisi kesehatan anggota keluarga berada dalam keadaan yang baik, serta terdapat peningkatan kemampuan untuk mengakses layanan kesehatan. Sebagian informan juga memiliki asuransi BPJS yang bersifat mandiri.

6) Kemudahan Akses Pelayanan Kesehatan

Akses layanan kesehatan menilai sejauh mana kondisi ekonomi rumah tangga mempengaruhi kemudahan dalam memperoleh layanan kesehatan formal seperti puskesmas atau klinik.

“Untuk berobat kepuskesmas gratis dan untuk rumah sakit umum itu pernah satu dua kali dan bisa aja membayarnya dari uang hasil sawit itu” (Mardan, wawancara pribadi, November 2025).

“Sama aja dan tidak ada perubahan baik setelah masuk ke usaha sawit atau usaha sebelumnya, dan dari segi pelayanan yang diterima juga sama aja tidak dibeda-bedakan” (Amat, wawancara pribadi, November 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit tidak secara langsung mengubah akses formal terhadap pelayanan kesehatan. Sebagian besar informan menilai bahwa akses ke puskesmas atau klinik pada

dasarnya sudah tersedia dan mudah dijangkau sebelum terlibat dalam sektor sawit, sehingga tidak dirasakan perbedaan yang signifikan dari kemudahan akses pelayanan kesehatan.

7) Kemudahan Akses Pendidikan Anak

Pendidikan anak merupakan salah satu indikator utama dalam kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit berperan dalam mendukung akses dan keberlanjutan pendidikan anak dibandingkan dengan kondisi sebelum terlibat dalam sektor kelapa sawit.

“Alhamdulillah saya punya anak 3 orang dapat menyekolahkan hingga ke perguruan tinggi, ada yang sudah sarjana dan ada yang masih kuliah. Alhamdulillah semua diambil dari sebagian besar 75% pembiayaan pendidikan itu hasil sawit, dan terpenuhi kebutuhan untuk anak sekolah” (Tris, wawancara pribadi, November 2025).

“Untuk pendidikan anak tercukupi dari hasil sawit itu entah dari hasil panen dan jika hasil panen belum mencukupi maka mengambil hasil sawit yang dari buruh panen sawit” (Mardan, wawancara pribadi, November 2025)

Sebagian besar informan menyatakan bahwa biaya pendidikan anak dapat terpenuhi dengan lebih baik setelah terlibat dalam sektor sawit, bahkan hingga jenjang pendidikan tinggi. Pendapatan yang relatif stabil dari hasil kebun, aktivitas perdagangan sawit, maupun upah buruh panen memungkinkan keluarga untuk membiayai kebutuhan pendidikan secara berkelanjutan tanpa mengalami tekanan ekonomi yang berarti.

8) Kemudahan Transportasi

Akses terhadap sarana transportasi merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi yang berperan penting dalam menunjang aktivitas produktif rumah tangga. Hasil wawancara dibawah ini menunjukkan sektor sawit memengaruhi kemudahan akses transportasi dibandingkan dengan kondisi sebelum terlibat di sektor tersebut.

“Saya sangat bersyukur sekali, semenjak saya saya menjadi petani dan pengepul saya bisa membeli transportasi seperti sepeda motor dan mobil” (Amat, November 2025).

“Untuk transportasi masih menggunakan lama sebelum bergelut disawit sudah ada sepeda motor, belum kepikiran buat ganti karena masih bisa dipakai” (Mardan, November 2025).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap kepemilikan dan kemudahan akses transportasi, terutama bagi informan yang memperoleh pendapatan relatif lebih besar dari kegiatan berkebun dan perdagangan sawit atau pengepul. Namun demikian, tidak semua informan mengalami perubahan yang sama. Beberapa rumah tangga tetap menggunakan sarana transportasi yang dimiliki sebelum terlibat dalam sektor sawit karena masih dianggap layak, sementara peningkatan pendapatan lebih dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti pembelian tanah atau pembangunan rumah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan seluruh informan, ditemukan bahwa kondisi kesejahteraan ekonomi

masyarakat lokal yang telah diidentifikasi melalui indikator BPS secara organik mencerminkan nilai-nilai kesejahteraan dalam perspektif Islam. Temuan ini dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan masa depan keturunan, peningkatan pengetahuan dan kapasitas, serta pengelolaan dan distribusi harta.

1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Masa Depan Keturunan

Seluruh informan menyatakan bahwa keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit memberikan perubahan positif terhadap kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan menjamin masa depan anak-anak mereka. Informan Sutopo menyatakan:

"Pasti, setelah sudah ada kebun sawit ini apapun bisa kami jangkau namun perlahan atau bertahap. Alhamdulillah sekarang sudah terbukti punya alat transportasi dan bisa menyekolahkan anak dan itu berkat dari hasil kelapa sawit dan berkat dari doa orang tua." (Sutopo, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Tris menambahkan bahwa stabilitas ekonomi dari sektor sawit tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga pada keharmonisan keluarga dan kebersamaan dengan anak-anak:

"Waktu dengan anak-anak dan keluarga lebih terjamin, setiap saat kami bisa bersilaturahmi dengan anak-anak dan sebaliknya, lebih longgar waktunya jika dibandingkan dengan usaha lain sebelumnya. Namun hasil sawit ini naik turun, seperti pada waktu panen raya hasilnya itu banyak atau lebih dan saat lagi turun itu

standar lah tetap dapat mencukupi." (Tris, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Sutopo juga menyebutkan bahwa pola kerja di sektor sawit memberikan fleksibilitas yang mendukung kebersamaan keluarga:

"Sudah pasti, alhamdulillah selama punya kebun sawit itu lebih nyaman dibanding dulu, istilahnya 40% kerja di sawit dan 60% waktu luang dan berkumpul keluarga, karena kadang-kadang saya juga menggunakan sistem upah untuk panen." (Sutopo, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Mardan yang masih dalam tahap awal menyatakan bahwa meskipun pendapatan belum maksimal, ketenangan yang dirasakan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya:

"Kalau untuk pendapatan kurang lebih aja karena sawitnya masih belum maksimal dengan pekerjaan lain, namun memang di sawit ini jauh lebih tenang dan santai." (Mardan, wawancara pribadi, November 2025)

2) Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas

Keterlibatan dalam sektor sawit juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan pengetahuan dan kapasitas ekonomi informan. Informan Amat menyatakan:

"Saya lebih paham dengan usaha sawit ini karena sangat asyik dan menambah wawasan dan bisa saling bertukar pikiran dan pendapat tentang perkebunan kelapa sawit karena ini adalah investasi jangka panjang." (Amat, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Sutopo menyebutkan bahwa pengalaman sebelumnya menjadi modal pengetahuan yang berharga:

"Banyak pengalaman, dulu juga pernah kerja di kebun perusahaan jadi pengalaman dari situ saya terapkan ke kebun sendiri secara maksimal mungkin, namun belum bisa sama persis karena ada tanggung jawab lain juga." (Sutopo, wawancara pribadi, November 2025)

3) Pengelolaan dan Distribusi Harta

Dari sisi pengelolaan harta, seluruh informan menunjukkan orientasi jangka panjang dalam memanfaatkan hasil dari sektor sawit. Informan Tris menyatakan:

"Tergantung diri masing-masing yang mengaturnya, untuk aset insya allah sedikit-sedikit persiapan masa tua, kalau dibandingkan dengan dulu ibaratnya dulu itu kami cukup-cukup aja dan saat ini ada lebihnya dari hasil sawit itu." (Tris, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Mardan menegaskan bahwa pada tahap merintis, prioritas utama adalah membangun aset produktif:

"Kalau soal tabungan belum ada karena masih tahap merintis, jadi sekarang lebih mementingkan aset dulu untuk penghasilan untuk hari tua ke depan dan menjadi lebih baik serta memiliki pendapatan yang tetap." (Mardan, wawancara pribadi, November 2025)

Informan Lani memberikan perspektif tersendiri mengenai karakter perputaran harta dari sektor sawit:

"Dibilang banyak penghasilannya ya tidak juga, namun perputaran yang tidak pernah berhenti karena sawit itu setiap bulan atau 2 minggu sekali itu panen terus, sehingga bisa menyisihkan dalam setiap bulannya sedikit-sedikit. Tidak habis untuk pengeluaran rumah tangga saja, karena buruh panen ini kan

bisa setiap hari ada job-nya tergantung saya mau ambil atau tidak." (Lani, wawancara pribadi, November 2025)

Namun demikian, dari sisi distribusi, terdapat ketimpangan yang nyata di antara kelompok aktor. Pengepul dan petani swadaya memperoleh surplus yang jauh lebih besar dibandingkan buruh panen dan petani plasma, meskipun kedua kelompok terakhir juga berkontribusi langsung dalam proses produksi.

B. Pembahasan

1. Keterlibatan Masyarakat Lokal Kecamatan Kelumpang Barat dalam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Keterlibatan masyarakat lokal di Kecamatan Kelumpang Barat dalam sektor perkebunan kelapa sawit menunjukkan pola yang beragam dan dinamis. Keberagaman bentuk keterlibatan ini menunjukkan kompleksitas struktur ekonomi perkebunan kelapa sawit pada tingkat lokal, tidak hanya ditentukan oleh pilihan individu namun juga kepemilikan modal dasar (*livelihood assets*) yang dimiliki oleh masing-masing pelaku.

a. Keberagaman bentuk keterlibatan berdasarkan aktor (peran)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit melalui 4 bentuk utama yaitu petani swadaya, petani plasma, buruh panen, dan pengepul. Keterlibatan ini sejalan dengan struktur aktor dalam sektor

perkebunan kelapa sawit yang dijelaskan dalam kajian teori, dimana industri kelapa sawit merupakan sistem ekonomi yang melibatkan banyak pihak dari berbagai peran, kepentingan, dan kedudukan (Hicon & SPKS, 2018; Muharam et al., 2023).

1) Petani Swadaya

Petani swadaya di Kecamatan Kelumpang Barat menggambarkan bentuk keterlibatan petani yang mandiri, dimana Informan Amat, Tris, Sutopo, dan Mardan menunjukkan bahwa seluruh aspek produksi dikelola sendiri tanpa adanya keterikatan dengan perusahaan. Temuan ini konsisten dengan definisi Muharam et al., (2023) yang menyatakan bahwa perkebunan swadaya merupakan perkebunan yang dipegang oleh perseorangan tanpa adanya keterikatan oleh pihak lain atau perusahaan, sehingga tidak adanya bimbingan, binaan, dan fasilitas yang biasanya didapatkan jika bermitra dengan perusahaan.

Namun, kemandirian petani swadaya juga akan membawa konsekuensi berupa rendahnya harga jual TBS yang ditawarkan jika dibandingkan dengan petani plasma. Hal ini sesuai dalam Hicon & SPKS (2018) yang menyatakan bahwa petani swadaya hanya bisa menjual hasil panennya kepada tengkulak sawit dan tidak bisa ke perusahaan secara langsung, sehingga harga yang diterima oleh petani swadaya menjadi lebih rendah. Temuan ini

mengkonfirmasi bahwa akses pemasaran dan saluran distribusi menjadi faktor yang mempengaruhi pendapatan petani, dimana pendapatan akan lebih tinggi jika TBS dapat dijual langsung ke PKS.

Tingkatan keterlibatan berdasarkan Peter Oakley, petani swadaya berada pada tingkatan *decision making* dan *risk taking*. *Decision Making* adalah tingkatan konsensus yang terjadi berdasarkan pada keputusan kolektif. Negosiasi yang berada di tingkat ini menggambarkan tingkatan perbedaan yang terjadi dalam sebuah kelompok atau individu (Ismono et al., 2024). Petani swadaya memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan kebun mereka. Mengambil otonomi penuh dalam menentukan waktu pemupukan, jenis pupuk yang digunakan, waktu panen, strategi pemasaran (menjual ke pengepul mana), dan penggunaan hasil panen (untuk konsumsi, reinvestasi, atau tabungan). Keputusan-keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan mereka sendiri, meskipun tetap dibatasi oleh kondisi pasar dan akses terhadap sumber daya. Namun, keputusan yang diambil petani swadaya tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh eksternal. Sistem kredit pupuk dengan pengepul membuat petani swadaya memiliki keterikatan dalam hal pemasaran hasil panen, karena pembayaran kredit pupuk dilakukan melalui pemotongan langsung dari hasil

penjualan TBS. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun petani swadaya berada pada tingkatan *decision making*, kebebasan mereka tetap dibatasi oleh struktur ekonomi yang ada.

Petani swadaya juga termasuk ke dalam tingkatan keterlibatan *risk taking*. Tingkatan ini menunjukkan proses yang tidak hanya mengambil atau menghasilkan keputusan, namun mempertimbangkan akibat yang dihasilkan dari suatu keputusan, mulai dari keuntungan, hambatan, hingga implikasinya (Ismono et al., 2024). Petani swadaya berada pada tingkatan ini karena mereka tidak hanya mengambil keputusan operasional, tetapi juga menanggung risiko finansial dari keputusan tersebut. Seperti keputusan petani swadaya yang melakukan ekspansi lahan dengan mengambil pinjaman bank (seperti yang dilakukan informan Amat) mengandung risiko kegagalan produksi atau penurunan harga yang bisa menyebabkan kesulitan dalam pembayaran kredit.

2) Petani Plasma

Skema plasma yang dijalankan oleh PT Palma Plantation di Kecamatan Kelumpang Barat memiliki karakteristik yang unik jika dibandingkan dengan pola plasma pada umumnya. Berdasarkan dengan temuan lapangan, PT Palma Plantation menggunakan sistem *full management* dimana perusahaan mengelola keseluruhan aspek operasional kebun dan petani

mendapatkan pendapatan bersih, setelah dikurangi berbagai pemotongan biaya seperti biaya koperasi, biaya operasional, dan angsuran kredit perbulannya. Fenomena ini tidak sejalan dengan penjelasan dalam dokumen Tata Kelola Perkebunan Sawit di Indonesia yang menyebutkan bahwa petani plasma menerima hasil penjualan TBS secara bersih setelah dikurangi cicilan kredit yang dijalankan lebih kurang 8 tahun (IPB, 2018).

Pendapatan yang diterima oleh petani plasma ini bersifat fluktuatif yaitu berkisar Rp400.000 – Rp2.900.000 atau rata-rata sebesar Rp1.650.000 perbulannya. Meskipun pendapatan relatif lebih kecil dibandingkan potensi dari pengelolaan mandiri, sistem plasma ini memberikan kepastian dan meminimalkan risiko usaha. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hicon & SPKS (2018), pendapatan petani plasma umumnya lebih stabil jika dibandingkan dengan petani swadaya karena sistem kemitraan dan pemasaran yang telah diatur.

Tingkatan keterlibatan menurut Peter Oakley dari petani plasma berada pada *consensus building* dan *partnership* (Ismono et al., 2024). Pada tingkatan *consensus building*, keterlibatan petani plasma tercermin dalam adanya kesepakatan awal antara petani dengan perusahaan terkait pola kemitraan yang akan digunakan, termasuk juga mekanisme pembagian hasil dan pemotongan pendapatan untuk pengembalian kredit.

Kesepakatan ini menunjukkan bahwa petani plasma tidak sepenuhnya pasif, namun tetap dilibatkan dalam proses penerimaan keputusan yang telah dirancang. Pada tingkat *partnership*, hubungan antara petani plasma dengan perusahaan mencerminkan adanya kerja sama formal yang saling mengikat. Petani plasma memperoleh kepastian pendapatan dan perlindungan dari risiko produksi serta fluktuasi harga TBS, sementara perusahaan mendapatkan akses terhadap lahan dan tenaga kerja masyarakat lokal.

Temuan ini juga menyebutkan bahwa pendapatan dari petani plasma ini dijadikan sebagai *side income* atau pendapatan sampingan yang menunjukkan strategi diversifikasi ekonomi rumah tangga. Hal ini mencerminkan upaya masyarakat untuk meminimalkan risiko dengan tidak mengandalkan satu sumber pendapatan saja.

3) Buruh Panen

Buruh panen merupakan aktor yang terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit sebagai tenaga kerja harian dengan sistem upah borongan. Keterlibatan ini menggambarkan kelompok masyarakat dengan keterbatasan *financial capital* dan *natural capital* (kepemilikan lahan). Hal ini menunjukkan bahwa buruh panen adalah pekerja yang dibayarkan upahnya

berdasarkan volume atau jumlah yang telah dihasilkan dari panen kelapa sawit (Rika et al., 2022).

Informan Mardan dan Lani menyebutkan bahwa sistem upah borongan sebesar Rp300.000 per ton ini memberikan potensi pendapatan yang cukup tinggi, namun tetap terdapat tantangan terhadap faktor eksternal. Temuan mengenai “masa trek” atau fase generatif (kembang jantan) yang dapat terjadi 2 tahun sekali dalam kurun waktu lebih kurang 6 bulan mengkonfirmasi bahwa tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan dalam usaha perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana

Dalam kerangka partisipasi Peter Oakley, keterlibatan buruh dalam sektor perkebunan kelapa sawit berada pada tingkatan *consultation* (Ismono et al., 2024). Pada tingkat *consultation*, Informan Mardan dan Lani sebagai buruh panen hanya berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan (memanen TBS) dengan sistem upah borongan. Mereka dapat memberikan masukan kepada pemilik kebun mengenai kondisi tanaman atau waktu panen yang tepat, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemilik kebun. Posisi ini mencerminkan tingkat partisipasi yang masih terbatas.

4) Pengepul

Peran pengepul menjadi jembatan vital antara petani swadaya dan pabrik kelapa sawit (PKS). Peran pengepul dalam distribusi hasil panen petani dijelaskan dalam Buku Saku Kajian Strategis Tata Kelola Sawit di Indonesia, dimana banyak petani swadaya memilih menjual ke pengepul karena pembayaran tunai untuk kebutuhan sehari-hari (Hicon & SPKS, 2018). Pengepul menjual TBS yang dikumpulkan ke beberapa perusahaan sawit dengan memilih perusahaan yang menawarkan harga paling tinggi.

Menjadi pengepul memiliki risiko utama yaitu fluktuasi harga harian yang terjadi. Apabila buah yang dibeli dari petani lokal tidak dikirimkan (dijual) ke perusahaan sawit di hari yang sama maka akan memungkinkan terjadi perubahan harga TBS turun misalnya Rp30 atau Rp50 rupiah per kilogram. Risiko ini menunjukkan bahwa meskipun pengepul mendapatkan margin dari selisih harga beli-jual, mereka juga menghadapi ketidakpastian pasar yang signifikan.

Pada tingkatan partisipasi pengepul oleh Peter Oakley, pengepul berada pada tingkatan *risk taking* dan *self management*. Pada tingkatan *risk taking*, sebagai pengepul harus mempertimbangkan risiko fluktuasi harga harian ketika membeli TBS dari petani lokal. Keputusannya untuk membeli TBS pada hari tertentu dengan harga tertentu mengandung risiko bahwa

harga jual ke perusahaan bisa turun pada hari yang sama, sehingga bisa mengalami kerugian.

Pada tingkatan *self management* Tingkatan ini merupakan puncak dari keterlibatan masyarakat, dimana stakeholder berinteraksi dalam setiap prosesnya agar mengoptimalkan hasil dan memperhatikan hal-hal yang krusial. Dalam konteks penelitian ini, petani swadaya yang telah berkembang menjadi pengepul dan memiliki kontrol penuh atas seluruh rantai produksi dan pemasaran dapat dikategorikan mendekati tingkatan ini.

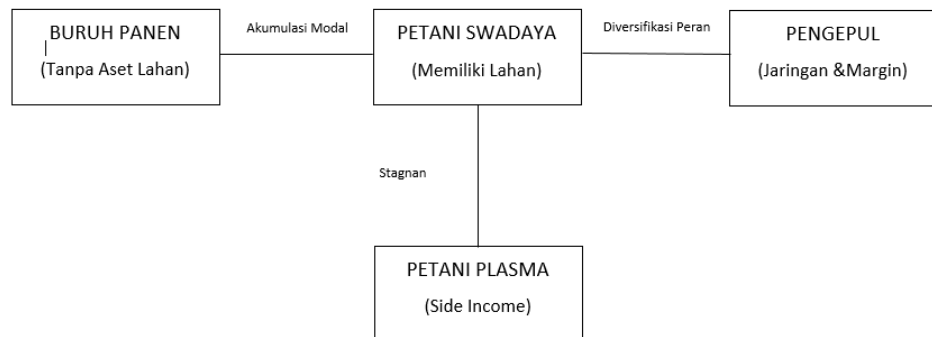
Informan Amat menunjukkan karakteristik *self management* karena ia tidak hanya mengelola kebun sawitnya sendiri, tetapi juga mengembangkan usaha sebagai pengepul. Ia memiliki kendali atas seluruh aspek usahanya, dari produksi di kebun sendiri, pengumpulan TBS dari petani lain, hingga pemasaran ke berbagai perusahaan sawit. Ia juga memiliki kebebasan untuk memilih strategi usaha, seperti diversifikasi peran dan perluasan jaringan pemasaran.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa meskipun informan Amat memiliki tingkat otonomi yang tinggi, ia tetap beroperasi dalam struktur pasar yang lebih besar dimana harga TBS ditentukan oleh perusahaan PKS dan pasar global CPO. Dengan demikian, *self management* yang dicapai tetap memiliki batasan struktural yang berada di luar kendalinya.

b. Pola mobilitas ekonomi dalam sektor perkebunan kelapa sawit

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya pola mobilitas ekonomi vertikal yang terjadi dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Mobilitas ekonomi ini merujuk pada perpindahan posisi atau peran seseorang dalam struktur ekonomi sektor sawit, yang

Gambar 4 2: Diagram Mobilitas Vertikal



sejalan dengan konsep mobilitas sosial vertikal yang dikemukakan oleh Pitirim Sorokin. Dalam teori Sorokin, mobilitas vertikal adalah perpindahan dari satu strata ke strata lainnya, dari yang tinggi ke yang rendah atau sebaliknya (Parttinasarany, 2012 dalam Nasution, 2019).

Sumber: Data diolah, 2026

1) Buruh Panen > Petani Swadaya

Secara umum, seorang buruh panen memiliki kemungkinan untuk bertransformasi menjadi petani swadaya apabila mampu memanfaatkan pendapatan dari upah kerja sebagai modal awal untuk investasi produktif. Meskipun buruh panen pada awalnya berada pada posisi ekonomi yang rentan karena tidak memiliki aset lahan maupun kontrol terhadap produksi,

pekerjaan ini tetap dapat menjadi titik awal dalam proses akumulasi modal secara bertahap.

Proses mobilitas tersebut biasanya berlangsung dalam jangka panjang dan membutuhkan strategi ekonomi yang konsisten. Ketika modal yang terkumpul telah mencukupi, buruh panen dapat mulai membeli atau mengelola lahan sendiri dan menanam kelapa sawit secara mandiri. Setelah kebun memasuki masa produktif dan mulai menghasilkan TBS, individu tersebut mengalami perubahan status ekonomi dari pekerja upahan menjadi pelaku usaha tani yang memiliki aset produktif. Dengan demikian, sektor kelapa sawit dapat berperan sebagai ruang mobilitas sosial-ekonomi, meskipun peluang tersebut tidak terjadi secara instan dan sangat bergantung pada kemampuan individu dalam mengelola pendapatan serta ketersediaan akses terhadap lahan dan modal.

2) Petani Swadaya > Pengepul

Mobilitas ekonomi vertikal dalam sektor perkebunan kelapa sawit tidak hanya terjadi dari buruh panen menjadi petani swadaya, tetapi juga dapat berlanjut dari petani swadaya menjadi pengepul. Secara umum, seorang petani swadaya memiliki peluang untuk naik ke posisi ekonomi yang lebih strategis apabila mampu melakukan akumulasi modal dan memperluas jaringan pemasaran. Petani swadaya yang berhasil meningkatkan produksi

melalui perluasan lahan dan pengelolaan kebun yang efektif cenderung memiliki kapasitas finansial lebih besar untuk mengembangkan peran ekonomi di luar aktivitas budidaya.

Peralihan dari petani swadaya menjadi pengepul biasanya didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi tawar dalam rantai nilai perkebunan kelapa sawit. Dengan menjadi pengepul, individu tidak hanya memperoleh keuntungan dari hasil kebun sendiri, tetapi juga mendapatkan tambahan margin dari aktivitas pengumpulan dan penjualan TBS dalam volume besar. Posisi pengepul memberikan akses langsung ke perusahaan atau pabrik kelapa sawit, sehingga memungkinkan pelaku usaha memilih saluran pemasaran dengan harga yang lebih kompetitif dan mengurangi ketergantungan pada perantara lain.

Selain itu, mobilitas ini menunjukkan adanya diversifikasi peran dalam strategi ekonomi rumah tangga petani sawit. Ketika petani swadaya berkembang menjadi pengepul atau penjual input produksi seperti pupuk, mereka memperluas sumber pendapatan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi harga dan risiko produksi. Dengan demikian, sektor perkebunan kelapa sawit menyediakan ruang bagi aktor tertentu untuk melakukan mobilitas ekonomi lebih lanjut, dari produsen kecil

menjadi pelaku distribusi yang memiliki peran lebih dominan dalam struktur ekonomi perkebunan.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk keterlibatan

Keberagaman bentuk keterlibatan masyarakat dalam sektor perkebunan kelapa sawit tidak terjadi secara acak, melainkan ditentukan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Untuk menganalisis faktor-faktor tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka kerja *Sustainable Livelihoods Framework* yang dikembangkan oleh *Department for International Development* (1999), yang mengidentifikasi lima modal dasar (*livelihood assets*) yang menentukan kemampuan seseorang dalam memilih strategi penghidupan atau peran ekonomi.

1) *Human Capital*

Human capital merepresentasikan keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja, serta kondisi kesehatan yang mendukung individu dalam mencapai strategi penghidupan dan kesejahteraan (*Department for International Development*, 1999). Dalam konteks penelitian ini, *human capital* mencakup pengalaman kerja di sektor kelapa sawit, pengetahuan teknis mengenai budidaya dan pemanenan, kemampuan manajerial dalam mengelola kebun, serta kondisi fisik yang memadai untuk menjalankan aktivitas perkebunan.

Petani swadaya umumnya memiliki akumulasi *human capital* yang lebih tinggi karena keterlibatan mereka berlangsung dalam jangka panjang dan mencakup berbagai aspek pengelolaan kebun. Pengalaman bertahun-tahun memungkinkan petani swadaya memahami siklus produktivitas tanaman sawit, teknik pemupukan yang efektif, waktu panen yang optimal, serta strategi menghadapi fluktuasi harga TBS. Pengetahuan teknis dan manajerial ini menjadi modal penting yang mendukung produktivitas kebun dan efisiensi usaha tani, sehingga petani swadaya memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara mandiri.

Sebaliknya, buruh panen memiliki *human capital* terutama dalam keterampilan teknis pemanenan. Mereka umumnya memahami praktik-praktik dasar dalam aktivitas perkebunan, seperti waktu panen yang tepat, cara memotong tandan buah segar, serta mengenali kondisi tanaman sawit. Selain itu, pengalaman bekerja di kebun membuat buruh panen memiliki akses informasi informal mengenai dinamika produksi dan pemasaran sawit. Namun, pengetahuan yang dimiliki buruh panen umumnya bersifat praktis dan operasional, sementara kesempatan untuk mengembangkan keterampilan manajerial dan kontrol terhadap pengelolaan kebun secara menyeluruh relatif terbatas. Keterbatasan akses terhadap aset produktif dan

pengalaman dalam pengelolaan usaha tani inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat transisi dari buruh panen menjadi petani swadaya membutuhkan waktu, modal, dan strategi ekonomi yang lebih besar.

Pada petani plasma, *human capital* yang dimiliki cenderung berbeda karena keterlibatan mereka berada dalam sistem kemitraan yang pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan. Petani plasma tidak sepenuhnya terlibat dalam proses teknis budidaya maupun pengambilan keputusan produksi, sehingga kesempatan untuk mengembangkan keterampilan manajerial relatif lebih terbatas. Namun demikian, petani plasma tetap memperoleh pengalaman dalam memahami mekanisme kemitraan, pola pembagian hasil, serta sistem pembayaran yang dapat menjadi bagian dari modal pengetahuan ekonomi dalam sektor sawit.

Sementara itu, pengepul memerlukan bentuk *human capital* yang lebih beragam, tidak hanya pengetahuan teknis tentang sawit tetapi juga kemampuan membangun jaringan sosial, membaca dinamika harga pasar, serta mengelola distribusi dan pemasaran TBS. Peran pengepul menuntut keterampilan negosiasi dan manajerial yang lebih tinggi karena mereka berada pada posisi perantara strategis dalam rantai nilai perkebunan kelapa sawit.

Selain keterampilan dan pengetahuan, kondisi kesehatan dan kemampuan fisik juga merupakan aspek penting dalam *human capital*. Aktivitas di sektor perkebunan, terutama pekerjaan buruh panen, memerlukan stamina yang kuat karena melibatkan pekerjaan berat seperti mengangkat TBS dan bekerja dalam kondisi lapangan yang menuntut. Ketergantungan pada kemampuan fisik ini menjadikan pekerjaan buruh panen rentan secara jangka panjang, karena seiring bertambahnya usia kemampuan fisik dapat menurun. Kondisi tersebut mendorong sebagian pekerja untuk berupaya melakukan investasi pada aset produktif seperti membuka kebun sendiri agar sumber pendapatan tidak sepenuhnya bergantung pada tenaga fisik.

Dengan demikian, perbedaan *human capital* antar aktor dalam sektor perkebunan kelapa sawit menunjukkan bahwa keterampilan, pengalaman, dan kondisi kesehatan memainkan peran penting dalam menentukan posisi ekonomi, peluang mobilitas, serta tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

2) *Sosial Capital*

Social capital adalah sumber daya sosial yang digunakan dalam mencapai tujuan kesejahteraan, yang dapat dilakukan melalui jejaring atau *networks*, keanggotaan dalam kelompok formal, dan hubungan kepercayaan (*trust*) serta timbal balik (*Department for International Development, 1999*). Dalam

konteks penelitian ini, modal sosial memainkan peran yang sangat signifikan terutama dalam akses terhadap input produksi dan jaringan pemasaran. Petani swadaya dapat memperoleh kredit pupuk dari pengepul bukan melalui mekanisme formal, melainkan melalui hubungan kepercayaan. Sistem kredit ini umumnya berjalan tanpa jaminan tertulis, petani akan menjual hasil panennya kepada pengepul sekaligus melakukan pembayaran kredit pupuk yang ada.

Selain itu, pengepul sebagai aktor perantara memiliki modal sosial yang lebih luas dibandingkan aktor lainnya. Pengepul umumnya membangun jaringan dengan berbagai perusahaan kelapa sawit serta menjalin relasi dengan banyak petani swadaya sebagai pemasok tetap. Jaringan yang luas ini memberikan keuntungan kompetitif karena pengepul dapat memilih perusahaan dengan harga terbaik sekaligus memastikan pasokan TBS yang stabil dari petani lokal. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya menjadi sumber daya pendukung, tetapi juga memperkuat posisi aktor tertentu dalam rantai nilai perkebunan kelapa sawit.

Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek modal sosial kolektif, khususnya terkait tidak adanya kelembagaan petani seperti kelompok tani. Kelompok tani yang seharusnya menjadi wadah pelatihan teknis,

distribusi pupuk bersubsidi, serta akses informasi pasar, dalam praktiknya tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan petani swadaya memiliki posisi tawar yang lemah secara kolektif meskipun jaringan individual mereka cukup kuat.

3) *Natural Capital*

Natural capital merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai basis penghidupan dan kesejahteraan, mencakup aset seperti lahan pertanian, pepohonan, serta kondisi ekologis yang mendukung aktivitas produksi (*Department for International Development*, 1999). Dalam konteks penelitian ini, perbedaan kepemilikan *natural capital* menjadi salah satu faktor paling menentukan dalam membedakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam sektor kelapa sawit. Petani swadaya yang memiliki lahan kebun sawit, khususnya dengan luasan beberapa hektar, memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar dibandingkan aktor lain seperti buruh panen yang tidak memiliki aset lahan sama sekali. Luas lahan secara langsung menentukan volume tandan buah segar (TBS) yang dapat dihasilkan, sehingga berdampak pada besaran pendapatan dan peluang akumulasi modal. Dengan demikian, kepemilikan lahan tidak hanya berfungsi sebagai aset produktif, tetapi juga sebagai penentu posisi ekonomi dalam struktur perkebunan sawit.

Selain kuantitas, kualitas lahan juga menjadi aspek penting dari *natural capital*. Produktivitas kebun sawit dipengaruhi oleh kesuburan tanah, ketersediaan air, serta usia tanaman. Dalam praktiknya, kebun sawit yang sudah memasuki fase menghasilkan dapat dipanen secara rutin, misalnya dua kali dalam sebulan, dengan produksi yang meningkat pada masa panen raya. Tingkat produktivitas ini menunjukkan bahwa *natural capital* bukan sekadar kepemilikan lahan, tetapi juga terkait dengan kualitas ekologis yang menentukan keberhasilan produksi dan pendapatan petani.

Bagi pengepul, lokasi lahan turut memengaruhi efisiensi ekonomi petani. Lahan yang dekat dengan akses jalan utama atau titik pengumpulan TBS cenderung memberikan keuntungan lebih besar karena biaya transportasi lebih rendah. Sebaliknya, lahan yang berada jauh dari infrastruktur jalan menghadapi biaya angkut yang lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses spasial merupakan bagian dari *natural capital* yang memengaruhi distribusi manfaat ekonomi dalam sektor sawit.

Sementara itu, bagi buruh panen, ketiadaan *natural capital* berupa lahan menjadi hambatan struktural utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tanpa aset lahan, buruh panen tidak dapat memproduksi TBS secara mandiri dan hanya bergantung pada pendapatan upah dari memanen kebun milik

orang lain. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan ekonomi jangka panjang, karena pendapatan buruh sangat dipengaruhi oleh musim panen dan kondisi fisik kerja.

4) *Physical Capital*

Physical capital adalah infrastruktur dasar dan barang produsen yang diperlukan dalam mendukung kehidupan, meliputi transportasi yang terjangkau, jalan raya, pasokan air, dan akses informasi, serta sarana produksi seperti alat yang digunakan untuk bekerja lebih produktif (*Department for International Development, 1999*). Keberadaan *physical capital* yang memadai dapat memperlancar aktivitas ekonomi, sedangkan keterbatasannya dapat menghambat distribusi hasil produksi, meningkatkan biaya usaha, serta memperbesar kerentanan masyarakat dalam sektor perkebunan. Dalam konteks Kecamatan Kelumpang Barat, kondisi *physical capital* secara umum sudah cukup mendukung aktivitas perkebunan kelapa sawit. Infrastruktur jalan, baik jalan kabupaten maupun jalan desa, relatif dapat diakses sehingga memudahkan mobilitas masyarakat dan distribusi tandan buah segar (TBS). Akses jalan yang baik menjadi faktor penting karena kelapa sawit merupakan komoditas yang harus segera diangkut setelah panen agar kualitasnya tidak menurun. Dengan demikian, keberadaan infrastruktur transportasi yang memadai dapat mengurangi biaya angkut

sekaligus meminimalkan risiko kerugian akibat keterlambatan pengiriman ke titik pengumpulan atau pabrik kelapa sawit (PKS).

Akses informasi menjadi bagian penting dari *physical capital* karena dapat memperkuat posisi tawar petani dalam negosiasi harga dengan pengepul. Dari segi sarana produksi, kepemilikan kendaraan angkut menjadi salah satu *physical capital* yang paling menentukan posisi ekonomi dalam rantai nilai sawit. Aktor yang memiliki kendaraan sendiri memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengangkut hasil panen, mengumpulkan TBS dari petani lain, serta menjual langsung ke perusahaan tanpa bergantung pada jasa transportasi pihak ketiga. Kondisi ini memberikan keuntungan kompetitif dan membuka peluang bagi petani tertentu untuk berkembang menjadi pengepul dalam struktur ekonomi perkebunan kelapa sawit.

Sebaliknya, buruh panen umumnya memiliki *physical capital* yang terbatas. Sarana produksi mereka biasanya hanya berupa alat panen sederhana seperti dodos dan egrek. Keterbatasan *physical capital* ini berdampak pada rendahnya peluang buruh panen untuk memperluas peran ekonomi di luar pekerjaan fisik, karena mereka tidak memiliki dukungan sarana yang memungkinkan akses langsung ke pasar atau pengelolaan usaha tani secara mandiri.

Dengan demikian, perbedaan akses terhadap *physical capital* menunjukkan bahwa infrastruktur dan sarana produksi tidak hanya mendukung produktivitas, tetapi juga membentuk hierarki ekonomi dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Aktor yang memiliki akses lebih besar terhadap *physical capital* cenderung memiliki peluang lebih tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan melakukan mobilitas ekonomi dibandingkan aktor yang hanya bergantung pada tenaga kerja fisik semata.

5) *Financial Capital*

Financial capital adalah sumber daya keuangan yang diperuntukan untuk mencapai tujuan penghidupan atau kesejahteraan seperti tabungan, simpanan bank, dan aset likuid dan aliran uang masuk teratur (*regular inflows*) seperti pendapatan (*Department for International Development, 1999*). Modal finansial adalah aset paling serbaguna karena dapat dikonversikan menjadi jenis modal lain, seperti membeli lahan (modal alam) atau membayar biaya pendidikan (modal manusia). Namun, modal ini seringkali menjadi aset yang paling sulit diakses oleh masyarakat miskin.

Dalam konteks sektor perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kelumpang Barat, kepemilikan *financial capital* menjadi faktor krusial yang membedakan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai peran ekonomi. Petani

swadaya yang memiliki modal awal, baik berupa lahan maupun pendapatan dari hasil panen, memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha melalui investasi produktif, seperti memperluas lahan, membeli pupuk, atau meningkatkan perawatan kebun. Sebagian petani bahkan dapat mengakses kredit formal melalui lembaga perbankan untuk memperbesar skala usahanya. Akses terhadap pembiayaan formal ini menunjukkan bahwa *financial capital* dapat mempercepat akumulasi aset dan memperkuat posisi ekonomi petani dalam struktur perkebunan sawit.

Selain itu, pengelolaan pendapatan yang terencana juga menjadi bentuk penting dari strategi akumulasi *financial capital*. Petani yang mampu membagi hasil panen untuk kebutuhan konsumsi, biaya produksi, dan tabungan cenderung memiliki cadangan finansial yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi darurat maupun untuk investasi jangka panjang. Cadangan ini memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga serta mengurangi tingkat kerentanan terhadap guncangan ekonomi.

Sebaliknya, buruh panen umumnya memiliki *financial capital* yang lebih terbatas. Meskipun pendapatan buruh panen pada masa tertentu dapat mencapai jumlah yang relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sebagian besar pendapatan tersebut habis untuk konsumsi sehari-hari sehingga

tidak menghasilkan surplus yang dapat ditabung. Ketiadaan tabungan menyebabkan buruh panen berada pada kondisi ekonomi yang rentan, terutama ketika menghadapi situasi seperti sakit, kecelakaan kerja, atau masa “trek” sawit ketika produksi dan kesempatan kerja menurun. Kerentanan ini menunjukkan bahwa pendapatan yang bersifat tidak stabil dan minimnya aset likuid mempersempit peluang buruh panen untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Dengan demikian, *financial capital* menjadi modal kunci yang menentukan kemampuan aktor dalam mengembangkan usaha, menghadapi risiko ekonomi, serta melakukan mobilitas vertikal dalam struktur perkebunan kelapa sawit. Perbedaan akses terhadap modal finansial menciptakan ketimpangan peluang kesejahteraan antara petani yang memiliki aset dengan kelompok buruh panen yang bergantung pada pendapatan upahan semata.

Analisis ini menegaskan temuan *Department for International Development* (1999) bahwa keterbatasan pada satu jenis modal dapat menjadi hambatan utama (barrier) bagi masyarakat untuk menaiki tangga keterlibatan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam konteks sektor perkebunan kelapa sawit, natural capital (lahan) dan financial capital (modal usaha) menjadi dua faktor pembatas yang paling krusial.

2. Dinamika Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Lokal Akibat Keterlibatan dalam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit

Bagian ini menganalisis dinamika kesejahteraan ekonomi yang dialami masyarakat lokal sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Analisis dilakukan berdasarkan dua kerangka indikator kesejahteraan, yaitu indikator kesejahteraan ekonomi adaptasi dari standar Badan Pusat Statistik (BPS) dan indikator kesejahteraan perspektif ekonomi Islam melalui pendekatan Maqashid Syariah. Penggunaan *dual framework* ini memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang kesejahteraan, tidak hanya dari aspek material tetapi juga dari dimensi nilai dan tujuan hidup yang lebih mendasar.

a. Analisis dinamika kesejahteraan ekonomi berdasarkan indikator BPS

1) Pendapatan rumah tangga

Pendapatan merupakan indikator utama kesejahteraan ekonomi karena mencerminkan kemampuan finansial keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar (Adimarta et al., 2022). Pendapatan rumah tangga meliputi seluruh sumber penghasilan yang diterima oleh anggota keluarga, baik dari hasil kerja utama, pekerjaan tambahan, maupun sumber lainnya. Pendapatan yang stabil dan mencukupi memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok, menabung, serta melakukan investasi produktif.

Tabel 4 2: Tingkat pendapatan peran di sektor perkebunan kelapa sawit

Peringkat	Peran	Pendapatan	Keterangan
1	Pengepul / Tengkulak	Paling tinggi (dari margin selisih harga beli-jual TBS + kebun sendiri)	Informan Amat: pendapatan meningkat >50%, memiliki motor & mobil, lahan berkembang, menjual ke beberapa PKS. Risiko fluktuasi harga harian.
2	Petani Swadaya	Variatif tergantung luas lahan (lebih tinggi dibanding buruh & plasma)	Tris: peningkatan income > dari gaji security; Sutopo: naik 60–65%. Lahan 3 ha menghasilkan ±2,8 ton

			TBS/panen (2x/bulan). Punya surplus untuk tabungan & investasi.
3	Buruh Panen	±Rp5.000.000/bulan (sistem borongan Rp300.000/ton)	Lani: akumulasi ±Rp5 juta/bulan, tapi fluktuatif. Turun saat masa trek (±6 bulan, 2 th sekali). Tidak punya aset lahan, rentan secara ekonomi.
4	Petani Plasma	Rp400.000 – Rp2.900.000/bulan (rata-rata ±Rp1.650.000)	Lahan 0,8 ha/KK, dikelola penuh oleh PT Palma Plantation. Dipotong biaya koperasi, operasional, dan angsuran kredit.

			Hanya dijadikan side income.
--	--	--	------------------------------

Sumber: Data Diolah, 2025

Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat sebagai petani swadaya mengalami peningkatan pendapatan yang relatif besar karena mereka memperoleh hasil langsung dari produksi kebun. Bahkan, sebagian petani mampu memperluas peran menjadi pengepul atau penjual input pertanian, sehingga pendapatan tidak hanya berasal dari kebun sendiri tetapi juga dari margin perdagangan dan jaringan pemasaran. Diversifikasi peran ini menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam dan meningkatkan kemampuan akumulasi aset.

Sementara itu, petani swadaya yang tidak berperan sebagai pengepul tetap mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan dibandingkan pekerjaan informal sebelumnya. Kebun sawit menjadi sumber pendapatan utama yang lebih stabil, bahkan berfungsi sebagai jaminan ekonomi jangka panjang, misalnya ketika memasuki masa pensiun atau tidak lagi bekerja di sektor formal.

Selain itu, petani plasma menunjukkan bahwa pendapatan yang didapatkan tidak selalu tinggi dan relatif kecil. Meskipun petani plasma memperoleh pemasukan rutin, jumlah yang diterima sering kali tidak sebesar pendapatan petani swadaya yang memiliki

kontrol penuh atas kebunnya. Kondisi ini menunjukkan adanya *trade-off* dalam sistem plasma, di mana petani mendapatkan stabilitas dan kepastian pasar melalui melalui kemitraan dengan perusahaan. Namun, ruang kemandirian ekonomi petani juga tetap terbatas karena sebagian besar pengambilan keputusan dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdul (2023) bahwa pendapatan petani sawit tidak hanya ditentukan dari produksi, tetapi juga dari sistem pemasaran, struktur biaya, luas lahan, serta mekanisme kelembagaan yang mengatur distribusi. Temuan empiris ini menegaskan bahwa sistem plasma di Kecamatan Kelumpang Barat secara struktural tidak dirancang untuk menjadi sumber pendapatan utama masyarakat. Dengan pendapatan bersih rata-rata Rp1.650.000 per bulan dari lahan seluas 0,8 hektar yang dikelola penuh oleh PT Palma Plantation, petani plasma tidak memiliki peluang untuk meningkatkan hasil karena tidak memegang kendali atas pengelolaan kebun. Sehingga, seluruh informan penerima plasma harus mengandalkan pekerjaan lain sebagai sumber pendapatan utama dan menjadikan plasma semata-mata sebagai *side income*. Inilah yang membedakan dinamika kesejahteraan petani plasma dari tiga kelompok aktor lainnya (swadaya, buruh, pengepul) yang semuanya menunjukkan peningkatan nyata dalam pendapatan dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, buruh panen juga merasakan peningkatan pendapatan dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Upah borongan dalam sektor sawit memberikan pemasukan yang relatif lebih rutin dibandingkan pekerjaan serabutan. Namun, pendapatan buruh panen sangat bergantung pada siklus produktivitas sawit serta kondisi fisik tenaga kerja. Pada masa “trek” sawit, kesempatan kerja dan pendapatan menurun, sehingga kelompok buruh tetap berada dalam posisi rentan.

Temuan empiris ini mendukung konsep kesejahteraan ekonomi yang dikemukakan oleh (Mutiara et al., 2020), bahwa semakin tinggi pendapatan yang diterima seseorang maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Peningkatan pendapatan yang dialami masyarakat setelah terlibat dalam sektor sawit menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit berkontribusi nyata dalam meningkatkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan ekonomi.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan tidak bersifat merata antar aktor. Pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana dijelaskan Abdul (2023), yaitu luas lahan, akses pemasaran, harga jual TBS, biaya produksi, tenaga kerja, modal, serta manajemen usahatani. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi dalam sektor

sawit tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan semata, tetapi juga oleh posisi aktor dalam struktur produksi dan distribusi ekonomi.

2) Pengeluaran rumah tangga

Besarnya pengeluaran menjadi indikator penting dalam menilai struktur konsumsi rumah tangga. Pengeluaran yang proporsional terhadap pendapatan menunjukkan keseimbangan finansial (Adimarta et al., 2022). Selain itu, proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan terhadap total pengeluaran sering digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan, semakin kecil proporsinya, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan rumah tangga dalam sektor perkebunan kelapa sawit memungkinkan pemenuhan kebutuhan pokok secara lebih baik dibandingkan sebelum terlibat dalam sektor ini. Peningkatan yang diperoleh tidak hanya mencukupi kebutuhan harian konsumsi, tetapi juga dapat menghasilkan surplus pendapatan yang bisa dialokasikan untuk tabungan dan investasi yang produktif.

Petani swadaya memiliki pola pengeluaran yang lebih kompleks dibandingkan aktor lain karena mereka harus mengalokasikan pendapatan untuk biaya produksi sekaligus konsumsi rumah tangga. Pendapatan dari hasil panen tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk pembelian pupuk, perawatan kebun, serta sebagian

dialokasikan untuk tabungan. Hal ini memperlihatkan adanya tiga fungsi penggunaan pendapatan, yaitu reinvestasi usaha, konsumsi rumah tangga, dan akumulasi simpanan. Komponen terbesar dalam pengeluaran petani swadaya adalah biaya produksi, terutama pupuk. Harga pupuk non-subsidi sekitar Rp450.000 per karung (50 kg) dengan kemampuan pemupukan sekitar 25 pohon sawit.

Untuk mengatasi beban biaya produksi yang tinggi, petani swadaya umumnya menggunakan mekanisme kredit pupuk melalui pengepul yang sekaligus bertindak sebagai penjual pupuk. Pembayaran dilakukan secara bertahap melalui pemotongan hasil panen pada setiap penjualan TBS, biasanya berkisar Rp200.000–Rp500.000 per panen tergantung volume produksi. Mekanisme ini membantu mengatasi keterbatasan likuiditas karena petani tidak perlu mengeluarkan dana besar sekaligus. Namun, di sisi lain sistem tersebut menciptakan hubungan ketergantungan karena petani cenderung harus menjual hasil panennya kepada pihak yang sama, sehingga berpotensi membatasi pilihan harga.

Meskipun demikian, setelah dikurangi biaya produksi dan kebutuhan konsumsi, petani swadaya pada umumnya masih memiliki surplus pendapatan yang dapat ditabung atau digunakan untuk investasi produktif seperti perluasan lahan maupun pembelian aset usaha. Kemampuan menghasilkan surplus ini

menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan kelompok pekerja yang tidak memiliki aset produktif.

Di sisi lain, pola pengeluaran petani plasma memiliki karakteristik yang berbeda dengan petani swadaya. Dalam sistem kemitraan, pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan sehingga petani tidak secara langsung mengeluarkan biaya produksi seperti pupuk, perawatan kebun, maupun upah tenaga kerja. Seluruh biaya operasional tersebut telah diperhitungkan dan dipotong sebelum pendapatan bersih diterima oleh petani melalui koperasi. Dengan pendapatan rata-rata Rp1.650.000 per bulan, petani plasma yang hanya bergantung pada pendapatan ini (tanpa sumber lain) kemungkinan memiliki proporsi pengeluaran pangan yang tinggi terhadap total pendapatan, yang mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan petani swadaya.

Data BPS (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di pedesaan mencapai Rp1.119.119. Jika asumsi satu rumah tangga petani plasma memiliki 4 anggota keluarga, maka kebutuhan konsumsi minimal sekitar Rp4.476.476 per bulan. Pendapatan plasma rata-rata Rp1.650.000 jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kecuali ada sumber pendapatan lain dari anggota keluarga atau dari usaha lain.

Dalam praktiknya, pendapatan dari kebun plasma umumnya tidak dijadikan sebagai sumber penghasilan utama rumah tangga,

melainkan sebagai pendapatan tambahan (*side income*). Hal ini disebabkan karena jumlah pendapatan yang diterima relatif terbatas dan tidak selalu mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga secara mandiri. Oleh karena itu, sebagian besar rumah tangga tetap mempertahankan sumber penghasilan lain, seperti mengelola kebun swadaya, berdagang, atau usaha informal lainnya. Dengan demikian, keberadaan kebun plasma lebih berfungsi sebagai penopang stabilitas ekonomi karena memberikan pemasukan rutin dan lebih pasti, tetapi belum mampu menjadi basis utama kesejahteraan ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem plasma cenderung berperan sebagai pengaman ekonomi (*economic safety net*), bukan sebagai sumber akumulasi modal yang mendorong peningkatan kesejahteraan secara signifikan.

Sementara itu, buruh panen memiliki pola pengeluaran yang relatif lebih sederhana karena tidak menanggung biaya produksi seperti petani. Pendapatan yang diperoleh dari upah borongan sebagian besar memang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Namun demikian, tidak seluruh pendapatan tersebut habis untuk konsumsi. Sebagian buruh panen berupaya menyalurkan penghasilan secara bertahap yang umumnya diarahkan untuk investasi produktif, terutama dalam bentuk kepemilikan kebun sawit sendiri secara perlahan. Pola ini

menunjukkan adanya orientasi jangka panjang dan strategi mobilitas ekonomi. Kemampuan menabung tersebut sangat bergantung pada stabilitas produksi dan kondisi kesehatan. meskipun terdapat upaya akumulasi aset, tingkat kesejahteraan buruh panen masih berada pada kondisi yang rentan karena proses investasi dilakukan secara bertahap dan belum sepenuhnya memberikan perlindungan ekonomi yang kuat.

Di sisi lain, pengepul memiliki struktur pengeluaran yang paling kompleks karena harus membagi pendapatan antara kebutuhan rumah tangga dan operasional usaha. Pengeluaran usaha meliputi modal pembelian TBS dari petani, biaya transportasi, perawatan kendaraan, serta biaya operasional lainnya. Namun, keuntungan dari margin perdagangan memberikan surplus pendapatan yang relatif lebih besar dibandingkan aktor lain. Surplus tersebut membuat pengepul dapat mengalokasikan dana untuk investasi produktif seperti penambahan kendaraan angkut, perluasan jaringan usaha, maupun diversifikasi usaha terkait. Kemampuan mengembangkan usaha dan menambah aset produktif menunjukkan tingkat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibandingkan pelaku lainnya dalam rantai nilai perkebunan kelapa sawit.

3) Kondisi tempat tinggal

Tempat tinggal merupakan cerminan nyata dari kondisi ekonomi keluarga, di mana rumah yang layak huni umumnya memiliki atap, lantai, dan dinding yang kokoh, serta ventilasi dan sanitasi yang memadai (Adimarta et al., 2022). Indikator ini sangat relevan dalam menilai sejauh mana keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit berdampak pada perbaikan kondisi hunian masyarakat lokal di Kecamatan Kelumpang Barat.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa seluruh informan mengalami perbaikan kondisi tempat tinggal yang nyata setelah terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Hasil observasi memperlihatkan bahwa rumah informan umumnya bersifat permanen dengan struktur bangunan yang kokoh, menggunakan atap seng atau asbes, dinding bata atau kombinasi bata dengan *kalsiboard*, serta lantai keramik atau semen. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan hunian yang umumnya dimiliki sebelum memperoleh penghasilan dari sektor sawit. Sebagaimana dinyatakan oleh informan Sutopo bahwa terjadi perubahan dalam kondisi rumah, yaitu ia dapat merenovasi rumah dari pendapatan hasil perkebunan kelapa sawit. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa surplus pendapatan dari sektor sawit digunakan secara produktif untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal.

Perbaikan kondisi tempat tinggal ini mencerminkan pola yang berbeda antar kelompok aktor. Petani swadaya dan pengepul,

yang memiliki akses lebih besar terhadap surplus pendapatan, umumnya telah membangun atau merenovasi rumah secara lebih signifikan. Sementara itu, buruh panen seperti informan Lani menyatakan bahwa sejak terlibat di sektor perkebunan kelapa sawit ia bisa membangun rumah sendiri dengan fasilitas yang memadai, yang sebelumnya belum dapat terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan buruh panen tidak sebesar petani swadaya, sektor kelapa sawit tetap memberikan peluang untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal secara bertahap.

Dengan demikian, temuan ini sejalan dengan pandangan Adimarta et al. (2022) bahwa kondisi tempat tinggal merupakan salah satu indikator nyata kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Peningkatan kualitas hunian yang dialami oleh seluruh informan mengkonfirmasi bahwa keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit secara konsisten berkontribusi pada perbaikan kondisi fisik tempat tinggal, meskipun dengan tingkat dan kecepatan yang berbeda sesuai dengan posisi ekonomi masing-masing aktor dalam struktur perkebunan.

4) Fasilitas tempat tinggal

Fasilitas dasar tempat tinggal seperti listrik, air bersih, jalan yang dapat dilalui kendaraan, serta akses terhadap fasilitas sosial seperti sekolah, pusat kesehatan, dan pasar merupakan komponen penting yang menentukan kualitas hidup rumah tangga (Adimarta

et al., 2022). Indikator ini menilai sejauh mana keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit berkontribusi pada pemenuhan fasilitas tempat tinggal masyarakat lokal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan merasakan peningkatan yang konsisten dalam hal pemenuhan fasilitas tempat tinggal setelah terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Informan Tris menyatakan bahwa selama mengelola sawit tidak pernah mengalami kesulitan untuk masalah fasilitas karena semuanya terpenuhi dari hasil sawit. Pernyataan serupa disampaikan oleh informan Mardan yang menyebutkan bahwa fasilitas rumah berangsur-angsur menjadi lebih baik, serta informan Sutopo yang menyebutkan perubahan fasilitas sekitar 80% menjadi lebih nyaman semenjak terjun di sektor kelapa sawit.

Dari sisi kepemilikan aset penunjang, petani swadaya dan pengepul yang memiliki pendapatan lebih besar mampu memenuhi fasilitas tempat tinggal secara lebih lengkap. Buruh panen pun mengalami peningkatan fasilitas, meskipun secara bertahap. Pemenuhan fasilitas ini tidak hanya terkait langsung dengan pendapatan, tetapi juga merupakan cerminan dari kemampuan manajemen keuangan rumah tangga yang lebih baik. Secara keseluruhan, temuan ini mendukung bahwa keterlibatan dalam sektor sawit berkorelasi positif dengan peningkatan fasilitas tempat

tinggal, yang merupakan salah satu indikator penting kesejahteraan ekonomi menurut standar BPS.

5) Kesehatan anggota keluarga

Kesehatan merupakan aset utama bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi keluarga, karena rumah tangga yang anggota keluarganya sering sakit cenderung mengalami penurunan produktivitas serta peningkatan beban biaya (Adimarta et al., 2022). Dalam konteks ini, indikator kesehatan anggota keluarga menilai perubahan kondisi fisik dan kemampuan mengakses perawatan medis yang terjadi setelah informan terlibat dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan menyatakan kondisi kesehatan anggota keluarga berada dalam keadaan yang baik. Informan Sutopo menyatakan bahwa seluruh keluarganya dalam kondisi sehat dan memiliki asuransi BPJS mandiri yang bukan bantuan pemerintah, serta masih mudah membayar iuran perbulannya. Informan Tris juga menyatakan hal serupa, bahwa seluruh keluarganya sehat dan memiliki BPJS, bahkan pernah berobat dengan biaya mandiri tanpa menggunakan fasilitas BPJS. Kemampuan membayar premi BPJS secara mandiri dan berobat dengan biaya sendiri merupakan indikator penting peningkatan kemampuan ekonomi dalam bidang kesehatan.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa keterlibatan dalam sektor perkebunan sawit, khususnya sebagai buruh panen, membawa risiko kesehatan tersendiri akibat pekerjaan fisik berat di lapangan terbuka. Namun demikian, peningkatan pendapatan memungkinkan informan untuk lebih mudah mengakses layanan kesehatan ketika diperlukan. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi dari sektor sawit memberikan dampak tidak langsung yang positif terhadap kemampuan keluarga dalam menjaga dan merawat kesehatan anggotanya.

6) Kemudahan akses layanan kesehatan

Kemudahan akses pelayanan kesehatan dinilai dari kemampuan rumah tangga untuk menjangkau fasilitas kesehatan dari sisi jarak, waktu tempuh, maupun biaya. Akses terhadap puskesmas, dokter, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya sangat penting karena menentukan kemampuan anggota keluarga untuk tetap sehat dan produktif secara ekonomi (Adimarta et al., 2022).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit tidak secara langsung mengubah akses formal terhadap pelayanan kesehatan. Sebagian besar informan menilai bahwa akses ke puskesmas atau klinik pada dasarnya sudah tersedia dan mudah dijangkau sebelum terlibat dalam sektor sawit. Informan Amat menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam hal akses layanan kesehatan, baik setelah masuk

ke usaha sawit maupun usaha sebelumnya, dan dari segi pelayanan yang diterima pun sama, tidak dibeda-bedakan. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur kesehatan di Kecamatan Kelumpang Barat sudah relatif memadai sebelum adanya perkebunan sawit.

Meskipun akses fisik ke fasilitas kesehatan tidak berubah secara signifikan, yang mengalami perubahan adalah kemampuan finansial untuk memanfaatkan layanan kesehatan tersebut. Informan Mardan menyatakan bahwa berobat ke puskesmas gratis dan pernah beberapa kali ke rumah sakit umum serta mampu membayarnya dari uang hasil sawit. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak keterlibatan dalam sektor sawit terhadap akses layanan kesehatan lebih bersifat tidak langsung, yaitu melalui peningkatan kemampuan finansial untuk menanggung biaya kesehatan, bukan melalui perubahan pada ketersediaan atau jarak ke fasilitas kesehatan itu sendiri

7) Kemudahan akses pendidikan anak

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan, karena dapat membuka kesempatan kerja yang lebih baik dan mengurangi kemiskinan antargenerasi. Ketersediaan dan keterjangkauan biaya pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana pendapatan dari sektor

sawit mampu mendukung pendidikan anak sebagai generasi penerus keluarga (Adimarta et al., 2022).

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pembiayaan pendidikan anak. Informan Tris, yang telah berkebun sawit sejak tahun 2005, menyatakan bahwa ia mampu menyekolahkan tiga anaknya hingga ke perguruan tinggi, di mana sekitar 75% biaya pendidikan tersebut bersumber dari hasil sawit. Ini merupakan capaian yang sangat berarti, mengingat biaya perguruan tinggi di Indonesia tergolong tidak murah. Demikian pula informan Mardan yang menyatakan bahwa kebutuhan pendidikan anak dapat tercukupi dari hasil sawit, baik dari hasil panen kebun swadaya maupun dari upah buruh panen yang ia jalankan.

Pola ini menunjukkan bahwa pendapatan yang relatif stabil dari hasil kebun atau upah buruh panen memungkinkan keluarga untuk merencanakan dan membiayai pendidikan anak secara berkelanjutan tanpa tekanan ekonomi yang berarti. Hal ini selaras dengan pandangan Todaro dalam Mutiara (2020) yang menyebutkan bahwa kesejahteraan tidak hanya terkait dengan pemenuhan kebutuhan material saat ini, tetapi juga dengan peningkatan harga diri dan kebebasan dalam menentukan masa depan. Kemampuan menyekolahkan anak hingga jenjang perguruan tinggi merupakan bentuk konkret dari peningkatan dimensi ini,

yang sekaligus menjadi modal generasi berikutnya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

8) Kemudahan transportasi

Sarana transportasi merupakan komponen penting dalam menunjang aktivitas ekonomi rumah tangga, baik untuk keperluan bekerja, menjual hasil produksi, mengakses pasar, maupun layanan umum lainnya. Kepemilikan kendaraan dan kemudahan mobilitas akan meningkatkan efisiensi ekonomi serta memperluas akses terhadap sumber penghasilan (Adimarta et al., 2022).

Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi dampak keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit terhadap kemudahan transportasi. Informan Amat yang berperan sebagai petani swadaya sekaligus pengepul menyatakan bahwa semenjak menjadi petani dan pengepul ia bisa membeli transportasi seperti sepeda motor dan mobil. Kemampuan memiliki kendaraan bermotor dan mobil secara mandiri merupakan indikator yang kuat dari peningkatan kesejahteraan ekonomi, khususnya bagi informan yang sebelumnya tidak memiliki sarana tersebut.

Namun demikian, tidak semua informan mengalami perubahan yang sama. Informan Mardan menyatakan bahwa untuk transportasi masih menggunakan kendaraan lama sebelum bergelut di sawit karena masih bisa dipakai, dan ia belum berpikir untuk menggantinya. Kondisi ini mencerminkan bahwa peningkatan

pendapatan dari sektor sawit tidak selalu langsung dialokasikan untuk pembelian sarana transportasi baru, melainkan diprioritaskan untuk kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak, seperti pembelian lahan atau pembangunan rumah. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa dampak sektor sawit terhadap kemudahan transportasi bervariasi sesuai dengan besaran pendapatan dan prioritas alokasi keuangan masing-masing rumah tangga, namun tren umumnya tetap menunjukkan adanya peningkatan kemampuan untuk memiliki dan memelihara sarana transportasi setelah terlibat dalam sektor ini.

b. Pemaknaan Nilai-Nilai Islam dalam Dinamika Kesejahteraan
Ekonomi Masyarakat Lokal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dinamika kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal di Kecamatan Kelumpang Barat juga mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan pensyariaan Islam dalam kerangka Maqashid Syariah. Pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan yang dialami oleh para informan. Sebagaimana telah teridentifikasi melalui indikator BPS secara inheren mencerminkan prinsip-prinsip penjagaan jiwa, keturunan, akal, dan harta yang terdapat dalam kerangka Maqashid Syariah (Suardi, 2021).

1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Jaminan Masa Depan Keturunan
sebagai Cerminan *Hifzh al-Nafs* dan *Hifzh al-Nasl*

Dalam kerangka Maqashid Syariah, *hifzh al-nafs* menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar yang menopang keberlangsungan hidup manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan rasa aman (Suardi, 2021). Sementara itu, *hifzh al-nasl* berkaitan dengan kemampuan menjamin keberlangsungan dan masa depan keturunan melalui keluarga yang harmonis dan terpenuhi kebutuhannya (Suardi, 2021). Peningkatan pendapatan yang dialami pengepul, petani swadaya dan buruh panen, yang memungkinkan mereka memperbaiki kondisi rumah, memiliki jaminan layanan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan pangan secara lebih baik, merupakan wujud konkret dari terpeliharanya *hifzh al-nafs* dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pernyataan informan Sutopo yang menyebutkan bahwa setelah memiliki kebun sawit "*apapun bisa dijangkau secara perlahan*" secara gamblang mencerminkan ketenangan jiwa yang lahir dari kepastian pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan inti dari *hifzh al-nafs*. Hal ini sejalan dengan pandangan Todaro (1981) dalam Mutiara et al. (2020) bahwa kesejahteraan mencakup kemampuan swasembada dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh ketenangan dari ketidaktergantungan pada pihak lain.

Pada saat yang sama, kemampuan para informan untuk menjamin masa depan anak-anak mereka melalui pendidikan merupakan cerminan nyata dari *hifzh al-nasl*. Informan Tris

berhasil membiayai pendidikan ketiga anaknya hingga jenjang perguruan tinggi yang sebagian besar bersumber dari hasil kebun sawit. Fleksibilitas waktu kerja di sektor sawit yang memungkinkan informan Sutopo membagi waktu antara aktivitas ekonomi dan kebersamaan keluarga juga mencerminkan terpeliharanya keharmonisan rumah tangga sebagai inti dari *hifzh al-nasl* (Suardi, 2021).

Namun demikian, pemenuhan kedua dimensi ini bersifat diferensial. Buruh panen yang tidak memiliki aset produktif menghadapi kerentanan yang lebih besar dalam menjamin stabilitas kebutuhan dasar, terutama saat masa trek berlangsung. Petani plasma dengan pendapatan rata-rata yang terbatas pun menyandarkan pemenuhan kebutuhan dasar dan masa depan anak pada sumber pendapatan lain di luar plasma. Ini menunjukkan bahwa *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl* terpenuhi secara berbeda-beda tergantung pada posisi aktor dalam rantai nilai sawit.

2) Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas sebagai Cerminan *Hifzh al-'Aql*

Hifzh al-'aql dalam konteks ekonomi tidak semata berbicara tentang pendidikan formal, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas berpikir, kemampuan pengambilan keputusan ekonomi, dan penguatan wawasan usaha (Suardi, 2021). Dalam kerangka SLF, dimensi ini berkaitan erat dengan penguatan

human capital sebagai modal dasar yang memungkinkan seseorang memanfaatkan modal-modal lainnya secara lebih optimal (Department for International Development, 1999).

Keterlibatan dalam sektor sawit terbukti memberikan penguatan pengetahuan praktis yang signifikan bagi informan. Proses pembelajaran langsung yang mencakup teknik pemupukan, negosiasi harga TBS, pengelolaan kredit pupuk, dan perencanaan waktu panen merupakan bentuk pengembangan akal yang bersifat praktis namun sangat bernilai dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-'aql* yang menekankan pentingnya pengembangan kapasitas intelektual dan kemampuan pengambilan keputusan yang rasional sebagai bagian dari kesejahteraan yang sesungguhnya (Suardi, 2021). Lebih jauh, kemampuan para informan dalam membiayai pendidikan formal anak-anak mereka merupakan investasi terbesar dalam dimensi *hifzh al-'aql* untuk generasi berikutnya, yang secara bersamaan juga memperkuat dimensi *hifzh al-nasl* dalam kerangka Maqashid Syariah.

3) Pengelolaan dan Distribusi Harta sebagai Cerminan *Hifzh al-Mal*

Prinsip ini tidak hanya berbicara tentang ada tidaknya pendapatan, tetapi menyentuh tiga hal mendasar yaitu kemampuan memperoleh harta secara halal dan produktif, kemampuan

mengelola dan mengembangkan harta secara otonom, serta keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi di antara seluruh pihak yang berkontribusi (Suardi, 2021).

Dari sisi perolehan dan pengelolaan harta, sektor sawit dinilai sebagai sumber penghasilan yang halal, jelas, dan dapat diandalkan. Karakter panen yang rutin setiap bulan atau dua minggu sekali sebagaimana disampaikan informan Lani mencerminkan aliran pendapatan yang stabil dan sejalan dengan prinsip pengelolaan harta yang tidak boros dan berorientasi pada keberlanjutan. Orientasi jangka panjang dalam membangun aset produktif sebagaimana disampaikan informan Mardan juga mencerminkan pemahaman yang selaras dengan prinsip *hifzh al-mal*, di mana harta tidak hanya dikonsumsi tetapi juga dikembangkan secara produktif untuk masa depan.

Namun demikian, aspek distribusi yang adil dalam prinsip *hifzh al-mal* belum terpenuhi secara kolektif. Temuan lapangan menunjukkan ketimpangan distribusi manfaat yang nyata. Nilai tambah terbesar dari TBS yang diproduksi masyarakat lokal lebih banyak dinikmati oleh pengepul dan perusahaan di hilir, sementara buruh panen yang menanggung beban fisik terbesar justru memperoleh pendapatan yang paling tidak stabil. Petani plasma memperoleh manfaat yang sangat terbatas akibat sistem *full management* oleh perusahaan yang menyebabkan mereka tidak

memiliki kendali atas aset yang secara formal merupakan milik mereka sendiri. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal* yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan tidak menumpuk pada segelintir pihak saja (Suardi, 2021).

Secara keseluruhan, perspektif nilai-nilai Islam menunjukkan bahwa indikator kesejahteraan BPS yang digunakan dalam penelitian ini bukan sekadar ukuran material, terdapat dimensi nilai yang lebih dalam yaitu terpenuhi atau tidaknya tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa, keturunan, akal, dan harta masyarakat lokal. Keterlibatan dalam sektor perkebunan kelapa sawit secara umum memberikan kontribusi positif terhadap pemenuhan nilai-nilai tersebut, meskipun distribusinya tidak merata dan *hifzh al-mal* sebagai prinsip keadilan distribusi masih menjadi tantangan dalam ekosistem ekonomi sawit di Kecamatan Kelumpang Barat.